



Sekda Kalbar Hadiri Seminar BPK

Borneo Tribune, Jakarta

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adakan kegiatan seminar Internasional, "Strategi Akuntabilitas Publik Untuk mewujudkan Good Governmen dan Clean Governmen". Acara tersebut di hadiri dari berbagai peserta, antara lain, Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan lain-lain.

Seminar yang berlangsung di Gedung BPK RI meghadirkan Para Narasumber/Pemateri, BPK RI, Menpan, Dirjen KeUangan Daerah, Kemendagri, Pertamina, Majalah Tempo, auditor Polandia, dan Malaysia. BPK RI, Jakarta, (20/1).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. M. Zeet Hamdy Assovie, MTM yang hadir pada acara tersebut mengatakan, inti pada kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada sekda se Indonesia, agar memahami pola pengelola keuangan yang baik dan benar. Penguatan soal akuntabilitas

publik pengelola keuangan, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), di nilai sangat tepat sekali sebagai sebuah Isu Nasional yang dibahas, karna mulai Tahun 2014 baik LKPP dan LKPD di tekankan harus Akuntabel.

Untuk mencapai hal tersebut, persyaratan utama yang harus di bentuk di Daerah misalnya memiliki sebuah system Wisel Blauer, untuk kepentingan penguatan Satuan Pengawasan Internal (Inspektorat) yang belum maksimal, oleh karena itu, system Wisel Blauer sangat dibutuhkan dalam rangka Early Warning Systems.

Masalah bidang keuangan, setiap transaksi pengeluaran atau pemasukan harus dicatat pada wktunya, Kapan terjadi traksaksi langsung catat, bukan menggunakan sistem yang lama. konsekuensinya, jangan coba di rubah, akan ketahuan.

Menurut Dirjen Keuangan, ini sudah di aplikasi pada

Tahun 2014 secara bertahap. Implementasi murninya pada Tahun 2015, ini tidak bisa lagi untuk bergerak-gerak. Untuk itu saya mengajak kepada semua satuan perangkat kerja Daerah yang ada di Prov Kalbar, untuk benar-benar bekerja, baik dalam peningkatan kinerja, menguatkan SDM dan lain sebagainya agar pada Tahun 2015 kita sudah siap dengan paraturan-peraturan yang ada.

Berkaitan dengan lahirnya UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, ini sudah tidak bisa lagi dihindari, pada Tahun 2014 ini semuanya akan menggunakan SKP (sistem Kinerja Pegawai) sebagai pengganti DP 3. SKP akan di ukur berdasarkan tiga poin besar, antara lain, setiap pegawai harus memiliki uraian tugas secara lngkap, memiliki buku saku pegawai, waskat yang kuat, karna sasaran kinerja pegawai di ukur dengan kuantitatif, dan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan. (Rinto/Humas Prov)